

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi pemerintah daerah ialah badan yang menjalankan aktivitas pemerintahan yang bersumber dari legitimasi dari masyarakat.¹ Akibatnya, tidak jarang muncul tuntutan publik untuk menuntut informasi akuntabilitas yang lengkap dan transparan atas kinerja instansi publik.² Dan sebagai organisasi sektor publik, hal itu haruslah selaras dengan syarat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998.³

Berlandaskan Pepres Nomor 29 Tahun 2014 perihal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PANRB mengembangkan SAKIP, yang merupakan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkannya laporan kinerja berkala yang ditetapkan oleh instansi pemerintah atas sukses atau tidaknya pelaksanaan program dan aktivitas yang diamanatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk meraih misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang sudah ditentukan.⁴ Hasil evaluasi SAKIP secara nasional sudah memperlihatkan instansi pemerintah Indonesia menjadi semakin mahir dalam menjalankan anggaran dengan andal untuk memenuhi target yang selaras dengan rencana pembangunan. Buktinya, instansi pemerintah sudah bisa memfokuskan kembali aktivitas program yang berimbas pada pencapaian tujuan pembangunan.⁵

¹ Awwaliyah Azizah, "Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja.," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 1, no. 1 (2020): 1–14.

² Tania Febrianti and Indrawati Yuhertiana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah," *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 14, no. 1 (2021): 137–46, <https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v14i1.381>.

³ Kezia Princesa Wantah, Lintje Kalangi, and Steven Tangkuman, "Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Non Vertikal Khusus Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 15, no. 3 (2020): 391, <https://doi.org/10.32400/gc.15.3.29734.2020>.

⁴ Aprilia Saputri, Yesi Mutia Basri, and Mudrika Alamsyah Hasan, "Determinan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah," *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 7, no. 2 (2022): 151–62, <https://doi.org/10.24967/ekombis.v7i2.1810>.

⁵ Pemprov Sumbar, "Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020" 53, no. 9 (2020): 1689–99.

Tetapi hasil peningkatan itu, tidak bisa mengimbangi dan belum cukup untuk memuaskan harapan masyarakat. Pada kenyataannya aktivitas anggaran seringkali tetap menjadi bumerang bagi akuntabilitas kinerja. Saat dijumpai manajemen keuangan yang tidak memadai atau target anggaran yang tidak memadai, efek buruknya justru bisa menyebabkan berkurangnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.⁶ Seperti halnya fenomena yang sedang menjerat Pemerintah Kota Pati yakni anggota DPRD mendapatkan kelurahan dari masyarakat perihal kurang perhatian dan tidak meratanya sarana prasarana pedesaan.⁷ Sehubungan dengan hal itu DPRD pun menyoroti usulan perihal Pemkab Pati untuk lebih meningkatkan peran Bappeda dengan menjalankan pembangunan secara merata.⁸

Implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja yang bisa mengatasi kurangnya interpretasi kinerja untuk meraih tujuan ialah satu dari sekian tantangan dalam memaksimalkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.⁹ Lewat implementasi penganggaran berbasis kinerja, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan publik dan mendukung transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan sektor publik, sehingga memengaruhi akuntabilitas kinerja instansi. Studi yang dijalankan oleh Anggreini mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara positif dipengaruhi oleh anggaran berbasis kinerja.¹⁰

Tantangan selanjutnya, Tata kelola keuangan daerah yang baik tergantung pada sejauh mana target anggaran pemerintah daerah ditetapkan secara jelas dan kongkrit, dengan tujuan agar ketetapan sasaran anggaran itu bisa dipahami oleh mereka yang bertanggung

⁶ Dewi Silvia Nur Desiana Wardani, “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Instansi Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung,” *Jurnal Bisnis & Akuntansi Unsurya* 6, no. 1 (2021): 47–56, <https://doi.org/10.35968/jbau.v6i1.625>.

⁷ Redaksi, “DPRD Pati Harapkan Pembangunan Merata,” *Mitrapost.Com*, November 2022, <https://bit.ly/googlenewsmitrapost>.

⁸ Jazilatu Khofshoh, “DPRD PATI Minta Pemkab Perhatikan Peran Bappeda,” *Lingkar.Co*, 2022, <https://lingkar.co/dprd-pati-minta-pemkab-perhatikan-peran-bappeda/>.

⁹ Nur Desiana Wardani, “Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (Lpmp) Provinsi Lampung.”

¹⁰ Ferina Anggraeni, “Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung) The Influence of Performance Based Budget Implementation on Performance Accountability of Government,” *Indonesian Accounting Research Journal* 1, no. 1 (2020): 36–44.

jawab untuk mencapainya.¹¹ Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa penelitian Azizah mengindikasikan bahwa secara signifikan akuntabilitas kinerja instansi dipengaruhi secara positif oleh ketetapan sasaran anggaran.¹² Di lain sisi ketepatan sasaran anggaran dalam penelitian Pangumbalerang & Pinatik memperlihatkan hasil yang tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.¹³

Di lain sisi, Pemerintah perlu lebih transparan dan akuntabel dalam administrasi perihal anggaran mereka.¹⁴ Sesuai regulasi, laporan keuangan yang dihasilkan harus akurat dan sesuai untuk memenuhi kewajiban pemerintah pusat dan kebutuhan informasi masyarakat.¹⁵ Penelitian Hafiz mengindikasikan bahwa ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berimbas positif terhadap akuntabilitas kinerja.¹⁶ Berlainan dengan studi yang dijalankan oleh Lumenta et al., yang mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja tidak secara signifikan tidak mempengaruhi ketaatan peraturan tetapi, sehingga hasilnya berbanding terbalik.¹⁷

Berlandaskan fenomena yang diuraikan pada latar belakang itu dan adanya *research gap* dari penelitian terdahulu, maka penulis tertarik mengambil judul **“ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ”**

¹¹ Nurul Fathia, “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja, Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Kinerja Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Study Kasus SKPD Di Prov” 4, no. 1 (n.d.): 670–85.

¹² Azizah, “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja.”

¹³ Sherly Pinatik Angreini Pangumbalarang, “Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Pendapatan Daerah Dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah” 2, no. 2 (2016): 1–23.

¹⁴ Maya Septiani, “Strategi Mewujudkan Transparansi Dan Partisipasi Dalam Pelayanan Publik,” *Ombudsman Republik Indonesia*, 2020, <https://ombudsman.go.id>.

¹⁵ Yoma Achmad Faizal and Rizal Yaya, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kulon Progo),” *Naskah Publikasi*, 2018, 1–18.

¹⁶ Muhammad Hafiz, “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pad” 21, no. 1 (2020): 1–9, <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.

¹⁷ Agnestasia Laura Lumenta, Jenny Morasa, and Lidia Mawikere, “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan),” *Jurnal EMBA* 4, no. 3 (2016): 135–46.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian itu, maka rumusan masalah pada studi ini, yakni:

1. Apakah implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?
2. Apakah ketetapan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?
3. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)?

C. Tujuan Penulisan

Berlandaskan rumusan masalah yang sudah disampaikan itu, tujuan dijalankannya studi ini ialah:

1. Untuk menguji implementasi anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
2. Untuk menguji ketepatan sasaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
3. Untuk menguji ketaatan peraturan perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

D. Manfaat Penulisan

Dari tiap-tiap penelitian tentunya akan didapat hasil yang diharapkan bisa memberi manfaat bagi peneliti ataupun pihak lain yang membutuhkan. Terutama dalam hal pengembangan keilmuan dan praktik. Ada juga manfaat peneliti ialah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis studi ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan memberi sumbangan berwujud ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Di lain sisi studi ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi IAIN Kudus, studi ini diharapkan bisa menambah literatur dan referensi yang bisa dijadikan bahan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti problematika serupa.
- b. Bagi kedinasan, hasil studi ini bisa dijadikan sarana informasi untuk menguak fakta perihal faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- c. Bagi penulis, studi ini merupakan implementasi teori-teori yang didapat selama masa kuliah dan diharapkan bisa menambah pengetahuan penulis, dan sebagai wahana

potensial untuk mengembangkan wacana dan pemikiran dalam mengimplementasikan teori yang ada dengan keadaan sesungguhnya.

E. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan proposal skripsi yang dipilih penulis dalam menyusun laporan penelitian deskriptif terbagi menjadi lima bab yang saling berhubungan selaras dengan tujuan penelitian dari penulis agar tidak terjadi suatu penyelewengan dari tujuan penelitian. Ada juga pembagian sistematika penulisannya yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan perihal Latar belakang, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat deskripsi teori yang berwujud deskripsi yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan laporan skripsi penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berfikir dan hipotesis

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini membahas perihal jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas perihal hasil studi yang memuat ilustrasi obyek penelitian analisis data (uji validasi, uji reliabilitas, uji pra syarat, uji hipotesis) dan pembahasan (komparasi A2 dengan teori atau penelitian lain)

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa berlandaskan yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.